

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa fungsi yang menyediakan data kuantitatif, terutama mempunyai suatu sifat keuangan dari suatu kegiatan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan - keputusan ekonomi dalam rangka memilih alternatif - alternatif dari suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam berbagai macam bidang terutama sekali dalam kegiatan ekonomi. Akuntansi mempunyai berbagai macam bidang yaitu, Akuntansi Perusahaan (*Business Accounting*), Akuntansi Pemerintahan (*Governmental Accounting*), dan Akuntansi Sosial (*Social Accounting*).

Akuntansi Keuangan Daerah merupakan salah satu bidang dalam kegiatan akuntansi sektor publik yang mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak semenjak era reformasi. Hal tersebut disebabkan karena adanya kebijakan baru pemerintahan Republik Indonesia yang mereformasi pengeluaran daerah semenjak itu. Reformasi tersebut di gunakan untuk menggantikan Undang – Undang No 5 tahun 1974 tentang pokok – pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang – Undang No 22 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang No 22 tahun 1999 tersebut berisi tentang perlunya di laksanakan Otonomi Daerah sehingga Undang –Undang tersebut di sebut dengan Undang –Undang Otonomi Daerah.

Menurut Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang di berikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam Akuntansi Pemerintahan data akuntansi di gunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintah dan organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba, melainkan melayani masyarakat dalam urusan dengan pemerintah.

Kas sebagai alat pembayaran yang likuid harus di kelola dengan baik untuk menghindari penyelewengan dan penyimpangan. Penyelewengan dan penyimpangan kas dapat di hindari dengan suatu sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang baik. Kas dapat dengan mudah di pindah tangankan dan tidak dapat di buktikan kepemilikannya, sehingga kas sangat mudah di selewengkan. Dengan adanya suatu sistem informasi dan pengendalian intern yang memuaskan, maka hal-hal yang merugikan perusahaan dapat di hindari dan diminimalisasi.

Kas pada dinas dan organisasi swasta sama - sama di jadikan sebagai dana yang di perlukan untuk kepentingan organisasi atau dinas tersebut. Perbedaannya terletak pada prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kasnya.

Pada dinas kas yang di dapat dari anggaran pemerintah provinsi atau dari penjualan aset daerah akan di terima oleh bendahara penerimaan yang dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja atau renja tahunan. Dari kegiatan yang di ajukan baru di buat anggaran yang di lanjutkan dengan pengeluaran dana yang di butuhkan oleh bendahara pengeluaran.

Pada organisasi swasta kas dapat berupa uang logam atau uang kertas yang ada dalamnya perusahaan (Cash on Hand) dan disimpan oleh bank yang pengambilannya tidak alat pasti (Cash On Bank) misalnya: simpana giro, tabungan yang bebas pengembaliannya serta alat pembayaran lainnya (Munawir: 2002). Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang atau penjualan secara kredit. Pembayaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek kecuali pembayaran dalam jumlah kecil, biasanya dilakukan dengan dana kas kecil. Dan kas kecil merupakan sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluaran - pengeluaran tertentu. Biasanya pengeluaran - pengeluaran yang di lakukan jumlahnya tidak besar, pengeluaran pengeluaran lain dilakukan dengan bank (dengan cek)". (Soemarso: 2004).

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu kabupaten dari 10 kabupaten di Bengkulu adalah satu dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang menganut sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Pemerintah Kabupaten Kepahiang terdiri dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perangkat daerah pengguna anggaran, yangg memiliki tugas dan fungsi

tertentu untuk mendukung Kabupaten Kepahiang dalam membangun daerah dan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Badan Keuangan Daerah (BKD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di bentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, BKD sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Karena pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu yang sangat strategis dalam hal pelaksanaan otonomi daerah maka penulis merasa tertarik untuk mempelajari pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, didalam bentuk Tugas Akhir dengan judul, “Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas ialah: Bagaimana Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dan Pengeluaran Kas Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.

### 1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui bagaimana Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dan Pengeluaran Kas Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.

### 1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini, yaitu:

#### 1. Bagi mahasiswa

- a. Mendapatkan pengalaman tentang kondisi dunia kerja di Badan Keuangan Daerah.
- b. Mengimplementasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.
- c. Menambah pengetahuan penulis tentang sistem akuntansi pengeluaran dan penerimaan kas di Badan Keuangan Daerah.
- d. Membentuk kepribadian bertanggung jawab ,disiplin dan tanggap dalam dunia kerja.
- e. Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penilaian dan penulisan selanjutnya terutama dalam sistem akuntansi pengeluaran dan penerimaan kas

#### 2. Bagi Universitas Andalas

- a. Untuk menjalin kerjasama serta hubungan yang baik antara Universitas Andalas dengan Badan Keuangan Daerah.
- b. Untuk meningkatkan kualitas lulusan universitas melalui pengalaman kerja magang, sehingga Universitas Andalas semakin dikenal oleh masyarakat luas dan oleh dunia kerja.

- c. Mempromosikan Diploma III Akuntansi yang berkualitas serta siap bersaing dengan khalayak umum dimanapun berada.

### 3. Bagi Instansi

- a. Dapat membina kerjasama antara instansi terkait dengan lembaga pendidikan.
- b. Dapat mempermudah serta membantu aktivitas pada instansi.
- c. Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh instansi.
- d. Menunjang dalam menghasilkan sumber daya manusia.

### 4. Bagi pihak lain

Dapat digunakan sebagai media informasi untuk mengetahui bagaimana kinerja BKD dalam proses sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.

## 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kuliah kerja praktek atau magang dilaksanakan pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang selama 40 hari kerja di mulai pada tanggal 25 Januari 2021 sampai tanggal 26 Maret 2021.

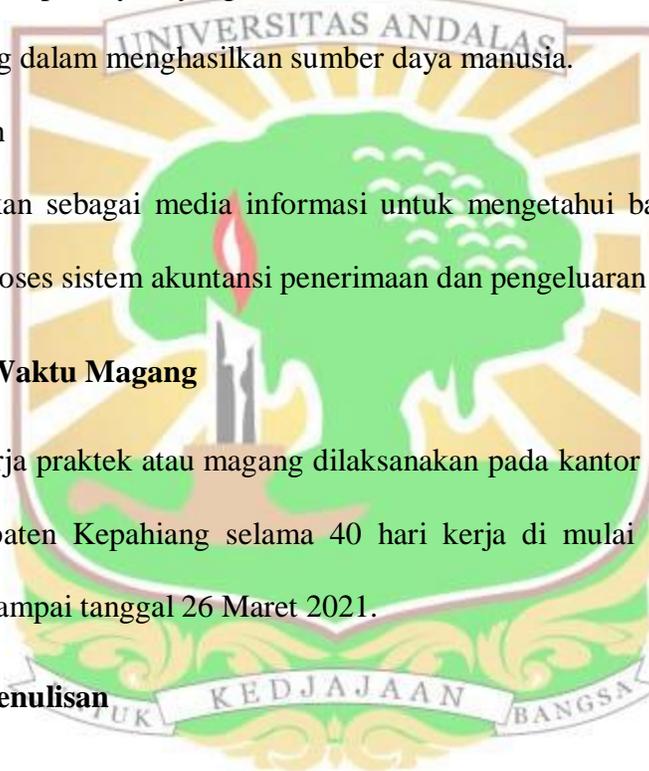
## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah dan tujuan serta manfaat magang dan waktu magang rencana kegiatan magang serata sistematika penulisan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang pengertian sistem akuntansi, pengertian kas, sistem akuntansi penerimaan kas, dan sistem akuntansi pengeluaran kas.



### BAB III GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan tentang hal yang berkaitan dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari sejarah berdirinya lembaga, visi dan misi serta struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.

### BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas data yang penulis olah melalui kajian teori dan sumber- sumber yang berkaitan dengan judul tugas akhir penulis, kemudian akan penulis sajikan dalam bentuk penjelasan guna menjawab rumusan masalah.

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran – saran yang di anggap perlu guna perbaikan dan lembaga untuk masa yang akan datang.

